

Volume I No.1 Januari-Juni 2011

ISSN: 2088-4427

ADIA

Jurnal Ilmu-Ilmu Keadaban



Asosiasi Dosen Ilmu-Ilmu Adab (ADIA)
Seluruh Indonesia

Susunan Pengurus Jurnal ADIA

Pemimpin Umum

Alwan Khoiri

Pemimpin Redaksi

Maharsi

Redaksi Ahli

Misri A. Mukhsin,
Abdul Wahid,
Taufiq A. Dardiri
Syuhabuddin Qalyubi

Editor:

Ali Sodiqin,
Mustofa
Tati Hartinah,
M. Faisol

Staff

Haryati, Sofwan

Terbit dua kali dalam satu tahun

Alamat Redaksi: Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta Telp. 0274-553949

Daftra Isi

Pengantar Redaksi	iii
Daftar Isi	vi
Kalimat Deklaratif Dalam Al-Qurân: Analisis Pragmatik Tindak Tutar	
<i>Oleh: H. Mardjoko Idris, MA</i>	1
Feminisme di Dunia Muslim Menguak Akar Perdebatan Antara Faham Konservatif Dan Reformis	
<i>Oleh : Sugeng Sugiyono</i>	13
Tokoh Surapati Dalam Naskah Babad Pinggiran	
<i>Oleh: Maharsi</i>	33
Cinta Qur'ani Dalam Novel "Mrs Dalloway" Karya Virginia Wolf	
<i>Oleh: Dwi Margo Yuwono, M.Hum</i>	63
Menggugat Tradisi: Konvergensi Dua Tokoh Pinggiran Minangkabau Suryadi, Syair Sunur: Teks dan Konteks	
<i>Oleh: R i d w a n</i>	77
Periodisasi Sejarah Hukum Islam di Indonesia (Dari Penetrasi Hingga Reformasi)	
<i>Oleh: Ali Sodiqin</i>	89
Pariwisata di Negeri Syariat	
<i>Oleh: Misri A. Muchsin</i>	117

Media dan Ruang Publik Dalam Pandangan Jürgen Habermas <i>Oleh: Nurdin Laugu</i>	129
Kekerasan Dalam Masyarakat Multikultural <i>Oleh: Badrun Alaena</i>	151
Peranan Orientasi Nilai-Nilai Keagamaan dan Tingkat Pendidikan Dalam Pembangunan Masyarakat <i>Oleh: Tafrihuddin</i>	169

KEKERASAN DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL

Oleh: Badrun Alaena

*Dosen Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

A. Pendahuluan

Keragaman budaya yang tersemai dalam kehidupan masyarakat Indonesia memberikan nuansa tersendiri, yang patut dibanggakan oleh seluruh elemen masyarakat dan negara-bangsa (nation-state). Prinsip dasar negara yang berpijak pada semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”, mencerminkan bahwa meskipun Indonesia adalah multikultural, tetap terintegrasi dalam keikaan, dan kesatuan.

Multikulturalisme merupakan salah satu realitas utama yang dialami masyarakat dan kebudayaan kita. Dan sebagai sebuah disiplin kajian sosiologis, dan disiplin keilmuan lain multikulturalisme secara sederhana dapat dipahami sebagai pengakuan bahwa sebuah negara atau masyarakat adalah beragam dan majemuk. Meskipun demikian, harus kita akui pula perbedaan dan keragaman budaya, agama, etnis, bahasa, dan lain-lain tidak secara otomatis diterima oleh masyarakat.

Betapa tidak, hari-hari ini kita masih seringkali menyaksikan peristiwa tragis terjadi berupa kekerasan atas nama kelompok, terutama menyangkut perbedaan keyakinan atau agama. Salah satu contoh paling mutakhir dan banyak mendapat perhatian masyarakat, termasuk pemerintah adalah kasus penyerangan kelompok Islam “garis keras” terhadap Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB),¹ yang pada waktu itu sama-sama sedang

¹ Aliansi ini dibentuk oleh beberapa lembaga yang *concern* terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan, untuk melakukan kampanye anti kekerasan atas nama agama,

melakukan demonstrasi di Monas Jakarta pada 1 Juni 2008 lalu.

Tidak ada yang tahu secara pasti apa motif mereka melakukan demonstrasi—yang biasanya selalu berpakaian serba putih dalam setiap aktivitasnya. Kelompok Islam “garis keras” tersebut, belakangan banyak orang mulai tahu kalau mereka adalah anggota Front Pembela Islam (FPI). Terbukti, setelah beberapa hari pascatragedi itu, Habib Rizieq, pimpinannya diperiksa oleh aparat kepolisian, dan hingga saat ini masih mendekam di sel penjara. Berbeda dengan AKKBB, yang waktu itu melakukan aksi pawai dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila bertema “Satu Indonesia untuk Semua”.

Tidak ada motif yang rasional mengapa terjadi penyerangan itu. Tetapi ketika massa yang mengtsnamakan ditanya mengapa mereka menyerang AKKBB, alasannya adalah karena AKKBB mendukung atau membela keberadaan Ahmadiyah di Indonesia, dan sebagian yang ikut dalam gerombolan AKKBB tersebut diketahui oleh massa FPI ada jema’ah Ahmadiyah. Di sini, semakin jelas bahwa kelompok FPI melakukan tindakan kekerasan atas nama agama, dengan menebarkan “teror” kepada kelompok lain yang tidak sejalan dengan apa yang mereka yakini.

Tragedi kekerasan tersebut sungguh memancarkan sisi lain atau paradoks terhadap apa yang disebut sebagai ‘ajaran agama’. Di satu sisi, ber(agama) di kehidupan modern sekarang ini sungguh menjadi daya pikat yang tak terbantahkan. Kehadirannya tidak lagi dihujat dan dihindari secara sinis sebagaimana yang pernah dilakukan oleh “kaum ateis” di awal-awal perkembangan ilmu pengetahuan beberapa abad silam.² Animo masyarakat yang menyambut positif agama tersebut menguatkan tesis Peter L. Berger (1969), yang menurut sosiolog humanistik itu sebagai kanopi suci (*the secret canopy*).³

dan melakukan advokasi terhadap kelompok-kelompok yang ditindas atas nama perbedaan keyakinan dan agama, terutama di Indonesia. Lebih lengkapnya lihat www.akkbb.wordpress.com.

² Sepanjang sejarah, perlakuan terhadap agama memang beragam. Kritik pedas terhadap agama yang menandai tahap akhir dari zaman metafisik dan yang paling mengguncangkan para pemeluk agama, tentu saja datang dari ketiga tokoh yang oleh Paul Ricoeur disebut sebagai “pengajar kecurigaan” (*maitre de soupcon*). Sigmund Freud (1858-1939) mensinyalir bahwa agama akan menjadi penyakit saraf yang mengganggu manusia, Friedrich Nietzsche (1844-1900) melalui pengamatan subyektifitasnya menyimpulkan bahwa Tuhan telah mati (*god is dead*), dan Karl Marx (1818-1883) dengan lantang mengatakan, agama sebagai candu masyarakat (*opium of the people*).

³ Agama, tulis Berger, ibarat langit suci yang teduh dan melindungi kehidupan. Agama sebagai penyiram panasnya kehidupan, yang dapat menumbuhkan tanaman. Dengan agama, manusia menjadi memiliki rasa damai, tempat bergantung, bahagia, dan memiliki ketenteraman hidup. Agama juga dapat melindungi manusia dari *chaos*, ketidakberartian

Dari itu, secara ideal dan teoritis, pendapat Berger di atas tentu dapat dibenarkan, dan tak ada yang menyangkal kebenarannya. Namun di sisi lain, dalam praktiknya, ketaatan beragama yang “berlebih” dalam dekade belakangan ini mulai diragukan, dikritik, dan diprotes oleh sebagian kalangan. Multikulturalisme yang sejatinya menjadi kekayaan budaya justru menjadi ancaman manakala kekerasan seringkali mewarnai kehidupan masyarakat kita.

Pertanyaannya adalah masihkah ada ruang kedamaian di tengah-tengah kehidupan serba kacau dalam masyarakat multikultural? Atau juga, kita perlu mempertanyakan, jika memang multikulturalisme (baca: keragaman) itu baik dan diakui sebagai bagian dari fitrah manusia, mengapa masih terjadi konflik horizontal karena mempersoalkan perbedaan?

Mohamed Fathi Osman, pernah berkomentar, bahwa multikulturalisme—atau yang ia sebut dengan istilah pluralisme—adalah bentuk kelembagaan di mana penerimaan terhadap keragaman melingkupi masyarakat tertentu atau dunia secara keseluruhan. Maknanya lebih dari sekadar toleransi moral atau koeksistensi pasif. Toleransi adalah persoalan kebiasaan dan perasaan pribadi, sementara koeksistensi adalah semata-mata penerimaan terhadap pihak lain, yang tidak melampaui ketiadaan konflik.⁴

Sayangnya, apa yang disiratkan secara empatik oleh professor dan guru besar pada Center for Muslim-Christian Understanding Georgetown University, Washington DC tersebut tidak sepenuhnya membumi di bumi pertiwi Indonesia yang konon dikenal masyarakatnya ramah, penuh kasih, tolong-menolong, dan lain-lain. Konflik dan kekerasan atas nama perbedaan (etnis dan agama) sekali lagi, masih saja mewarnai kehidupan masyarakat kita, seperti yang kerap terjadi di banyak daerah dan pada momen-momen tertentu.

B. Kekerasan dan masyarakat multikultural

Agak mengagetkan, ketika Francis Houtart mengatakan, bahwa setiap masyarakat itu mengandung kekerasan. Kekerasan dapat berbentuk fisik maupun simbolik. Ia dapat diterima atau diderita. Ia

hidup, dan situasi hidup tanpa arti. Lihat Haedar Nasir, *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 11.

⁴Lihat Mohammed Fathi Osman, *Islam, Pluralisme dan Toleransi Keagamaan*, terj. Irfan Abubakar, (Jakarta: Yayasan Paramadina, 2006), hlm. 2.

tampak dalam bentuk konstruksi, reproduksi atau transformasi dalam hubungannya dengan hubungan sosial. Sehingga alasan yang sangat fundamental dari hal ini adalah harus dicari dalam hati manusia itu sendiri.⁵ Karena itu faktor manusia menjadi sangat penting untuk menjelaskan mengapa kekerasan itu terjadi.

Manusia, menurut anggapan Thomas Hobbes, merupakan makhluk yang dikuasai oleh dorongan-dorongan irasional dan anarkistis yang saling mengiri dan membenci sehingga menjadi kasar, jahat, buas dan pendek pikir. Inilah sosok *homo homini lupus*, manusia adalah serigala bagi yang lain dan akibatnya perang semua lawan semua (*bellum omnium contra omnes*).⁶

Pada dasarnya, kekerasan adalah fenomena yang telah ada sejak awal sejarah umat manusia. Ini bisa dirujuk pada kisah al-Qur'an tentang pembunuhan Habil oleh Qabil, keduanya putra Adam.⁷ Bahkan sebelum manusia diciptakan di muka bumi ini, al-Qur'an telah memuat kisah dialog antara Tuhan dan malaikat yang secara tersirat mengindikasikan bahwa manusia akan selalu berbuat kerusakan di muka bumi (*man yufsidu fiha*) dan melakukan tindak kekerasan kepada sesamanya (*yasfik al-dima'a*).⁸ Oleh karena itu, kekerasan merupakan sesuatu yang inheren dalam diri manusia. Namun demikian, meskipun al-Qur'an melegitimasi adanya tindak kekerasan, al-Qur'an tetap menegaskan bahwa kekerasan merupakan kejahatan yang harus dicegah.

Secara harfiah, kekerasan itu diartikan sebagai sifat hal yang keras, kekuatan, dan paksaan.⁹ Sedang kekerasan yang dimaksud di sini adalah yang diterjemahkan dari *violence*. *Violence* berkaitan erat dengan gabungan kata Latin "*vis*" (daya, kekuatan) dan "*Latus*" (yang berasal dari *ferre*, membawa) yang kemudian berarti membawa kekuatan.¹⁰ Sedangkan secara terminologi kekerasan berarti perbuatan

5 Lihat Francis Houtart, "The Cult of Violence in the Name of Religion: A Panorama", dalam Wim Beuken dan Karl Josef Kuschel (ed.), *Religion as a Source of Violence*, (London: SCM Press, 1997), hlm. 1. Lihat juga Abdul Qadir Shaleh, "Agama" Kekerasan, (Yogyakarta: Prismsophi, 2003), hlm. 57

6 Franz Magnis Suseno, *Etika Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1987), hlm. 200-207.

7 Dikisahkan ketika keduanya mempersembahkan kurban, konon yang diterima hanya kurban Habil. Karena nafsu (dendam dan iri hati), lalu Qabil membunuh Habil (al-Maidah [5]: 27-31).

8 Lihat al-Baqarah [2]: 30.

9 WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), hlm. 498.

¹⁰ Marshana Windhu, *Kekuasaan dan Kekerasan menurut Johan Galtung*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm. 62.

seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.¹¹

Robert Audi, seperti yang dikutip oleh I. Marshana Windhu, merumuskan *violence* sebagai serangan atau penyalahgunaan fisik terhadap seseorang atau binatang; atau serangan, penghancuran, perusakan yang sangat keras, kasar, kejam dan ganas atas milik atau sesuatu yang secara potensial dapat menjadi milik seseorang.¹² Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*defensive*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain.¹³

Dari beberapa tafsir kekerasan tersebut semuanya menegaskan bahwa obyek kekerasan itu adalah bersifat fisik maupun barang yang dirusak oleh seseorang atau kelompok terhadap seseorang atau kelompok lain. Resikonya, si korbanlah yang sangat dirugikan oleh pelaku kekerasan tersebut, dengan cacatnya fisik seperti luka, patah, maupun rusaknya barang.

Dalam konteks itu, dapatlah ditarik benang merang bahwa kekerasan seperti yang dilakukan massa FPI terhadap AKKBB awal Juni lalu 2008 merupakan tindakan kriminal yang melanggar hukum. Sebab, kekerasan dengan alasan atau dalih apapun, apalagi mengatasnamakan agama tidaklah dibenarkan. Kekerasan atau "radikalisme", menurut Alwi Shihab, secara populer menunjuk kepada ekstremisme politik dalam aneka ragam bentuknya, atau usaha untuk mengubah orde sosial-politik secara drastis dan ekstrim.¹⁴

Menjadikan Tuhan atau agama semacam "pengkambing-hitaman", bagi René Girard akan bermuara pada konflik horizontal yang berujung pada pembunuhan antar sesama. Inilah wujud nyata dari kekerasan yang sebenarnya menyelimuti kita semua. Tapi kita tidak menyadarinya. Kekerasan membayang-bayangi siapa saja. Tapi siapa pun tak merasakan bayangan-bayangannya. Kekerasan

¹¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depdikbut dan Balai Pustaka, 1988), hlm. 425.

¹² I. Marshana Windhu, *Kekuasaan dan Kekerasan...* hlm. 63.

¹³ Jack D. Douglas dan Frances Chaput Waksler, "Kekerasan", dalam Thomas Santoso (ed.), *Teori-teori Kekerasan*, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11.

¹⁴ Lihat Alwi Shihab, *Islam Inklusif, Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 282.

mengancam manusia. Tapi manusia hidup seakan tanpa ancamannya. Kekerasan hadir setiap saat, bagai udara yang ada di mana-mana. Manusia menghirupnya, tanpa merasa, bahwa kekerasan masuk bagai napas yang menghidupinya.¹⁵

Dalam banyak kasus, FPI memang tergolong sangat sering melakukan tindak kekerasan dalam menyebarkan paham-paham keislamannya, seperti pengrusakan terhadap tempat-tempat yang dianggap maksiat. Tindakan anarkis ini tentu saja sangat mengganggu stabilitas keamanan setiap warga sebagai unsur penting dalam pembentukan negara Indonesia yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan perdamaian.

Apalagi, motif yang dijadikan alasan FPI dalam melakukan penyerangan selalu dilandasi hanya lantaran perbedaan keyakinan atau paham keagamaan dengan apa yang mereka yakini. Di setiap serangkaian peristiwa, Ahmadiyah seringkali menjadi "bulan-bulanan" oleh FPI, dan kemudian dijadikan legitimasi atas perbuatannya. Meskipun juga, Ahmadiyah bukanlah satu-satunya kelompok yang menjadi korban pelanggaran HAM atas tindak kekerasan itu. Di sana masih ada umat Kristiani dan jemaat Al-Qiyadah Al-Islamiyah, dan lain-lain.

Memang, dari sekian banyak akar kekerasan yang ada di masyarakat, kekerasan atas nama agama mempunyai intensitas yang paling besar. Karena di dalamnya sudah berkembang bentuk-bentuk kekerasan yang kompleks. Kekerasan atas nama agama bisa masuk ke jalur kekerasan terbuka dan bahkan yang lebih berbahaya manakala kekerasan itu masuk ke jalur tertutup. Kekerasan pada segmen ini biasanya bersifat ofensif, reaktif dan radikal, namun bisa juga terekayasa lewat aksi terselubung.¹⁶

Setara Institute for Democracy and Peace, misalnya mencatat, dalam setahun (2007) setidaknya 185 tindak pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Di mana serangkaian pengrusakan, kekerasan, dan penangkapan terhadap kelompok-kelompok yang dianggap "sesat" dipertontonkan kepada publik dengan gamblang. Tercatat 108 kasus penutupan, penyerangan, dan perusakan gereja terjadi pada 2004-2007. Rinciannya, pada 2004 terdapat 30 kasus, 2005

¹⁵ Lihat Sindhunata, *Kambing Hitam: Teori René Girard*, (Jakarta: Gramedia, 2006).

¹⁶ Lihat Abdul Qadir Shaleh, "Agama" Kekerasan... hlm. 79.

ada 39 kasus, 2006 ada 17 kasus, dan 2007 ada 22 kasus. Provinsi yang terbanyak terjadi kasus-kasus tersebut adalah Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Poso, dan Bengkulu.

Menurut Arifin Assegaf ada beberapa faktor mengapa agama menjadi penyebab kekerasan, yaitu: (1) eksklusivitas dari sementara pemimpin dan penganut agama, (2) sikap tertutup dan saling curiga antaragama, (3) keterkaitan yang berlebihan terhadap simbol-simbol, (4) agama yang merupakan tujuan berubah menjadi alat, realitas menjadi sekadar kebijaksanaan, dan (5) kondisi politik, sosial, dan ekonomi.¹⁷

Kekerasan dengan demikian menjadi hantu menakutkan bagi setiap pemeluk keyakinan setiap orang. Kekerasan seperti penyakit atau wabah: keduanya termasuk dalam misteri *the sacred* yang membahayakan. Penderitaan orang sakit analog dengan penderitaan korban kekerasan. Sama seperti orang sakit selalu diancam oleh kematian, demikian juga orang yang terlibat dalam kekerasan. Karenanya kalau penyakit harus dihindari, demikian juga kekerasan.

Dari serangkaian tragedi itu, pantas bila kita bertanya, siapa yang patut bertanggungjawab dan layak disalahkan? Bagi sebagian kalangan, negaralah yang mesti bertanggung jawab. Masih rentannya tindak kekerasan atas nama agama di Tanah Air menjadi bukti kuat atas kegagalan negara dalam memberikan jaminan hak keamanan dalam menjunjung tinggi makna kebebasan beragama.

Padahal, aturan baku seperti yang tertera dalam UUD 1945 Pasal 28E mengatakan sangat gamblang, bahwa "(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya". Pasal ayat (2) juga berbunyi senada: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".

Negara dengan demikian, sebenarnya telah melakukan pelanggaran HAM. Pelanggaran dilakukan dalam bentuk pembatasan, penangkapan, penahanan, dan vonis atas mereka yang dianggap

¹⁷ Lihat Arifin Assegaf, "Memahami Sumber Konflik Antariman", dalam Th. Sumartana, dkk, *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Institut Dian/Interfidei, 2001), hlm. 34-37.

sesat; negara telah melakukan pembiaran terhadap tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh warga atau kelompok; negara bahkan telah bertindak sebagai pelaku pelanggaran HAM akibat tindakannya itu serta membiarkan warga atau organisasi keagamaan melakukan persekusi massal atas kelompok-kelompok keagamaan dan keyakinan tertentu.

Negara seolah tidak memiliki kemauan politik (*political will*) dan kapasitas untuk bertindak tegas guna melindungi setiap dan seluruh warga negaranya dari ancaman dan tindakan kekerasan dari individu atau kelompok warga lainnya. Jika keadaan ini terus berlanjut, bukan hanya kekerasan yang dapat kian merebak di antara umat beragama, bahkan negara sendiri dapat menjadi sebuah "negara gagal" (*failed states*). Jika Indonesia menjadi "negara gagal", bisa dibayangkan implikasi dan konsekuensi selanjutnya; integrasi negara sulit dipertahankan sehingga seolah menunggu waktu bagi terjadinya apa yang sering disebut sebagai "Balkanisasi".¹⁸

Oleh karena itu, dalam konteks hubungan intra dan antar umat beragama, perlu pemulihan kembali kemauan politik dan kapasitas bertindak aparat negara. Jika ada pendapat menyarankan perlunya sebuah *strong state* yang memiliki kemauan politik dan kapasitas untuk melindungi setiap dan seluruh warganya, tidak berarti mereka menyetujui kembalinya negara otoriter dan diktatorial di Indonesia. Sebaliknya yang ingin disarankan adalah negara demokrasi yang kuat karena sesungguhnya demokrasi tidak bisa tegak jika negara "memble", tidak berdaya apa-apa melindungi warganya, tidak mampu menegakkan demokrasi. Jelas, hanya dengan kepatuhan pada tata hukum, ketertiban, dan keadaban publik, demokrasi bisa tegak secara lebih otentik.

Tak kurang pentingnya, representasi negara yang diwakili para pejabat dalam berbagai level harus pula senantiasa memperlihatkan komitmennya pada penegakan hukum. Hal ini karena bukan tidak jarang pejabat yang memikul tanggung jawab dalam kehidupan keagamaan, seperti Departemen Agama, tidak memberi garis yang tegas tentang ketidakbolehan melakukan ancaman atau kekerasan terhadap penganut atau kelompok keagamaan tertentu. Sebaliknya, bukan tidak jarang pejabat-pejabat ini mengeluarkan pernyataan dan

¹⁸ Lihat Azumardi Azra, "Kekerasan atas Nama Agama", dalam *Kompas*, edisi 27 Juli 2007.

kebijakan yang justru seolah menjadi justifikasi bagi tindakan-tindakan melanggar hukum itu.¹⁹

Menarik apa yang diungkap oleh Nasr Hamid Abu Zayd dalam diskusi terbuka di Yogyakarta, bersamaan dengan pencekalan dirinya oleh pemerintah melalui Departemen Agama saat hendak mempresentasikan pandangannya tentang keislaman akhir November 2007. Pemikir kontroversial itu menunjukkan fakta yang sangat ironi bagi sebuah negara dalam menyikapi kebebasan beragama bagi warganya.

Kebebasan beragama seperti yang banyak terjadi di banyak negara, termasuk di Indonesia, berjalan secara paradoks. Abu Zayd membandingkan antara kebebasan pasar dengan kebebasan beragama itu sendiri; kebebasan pasar yang ditandai dengan globalisasi dan sistem kapitalisme justru diadopsi secara terang-terangan oleh negara. Sementara kebebasan beragama malah tertahan, tidak dibiarkan mengalir secara alami sebagai kodrat manusia.

Akibatnya, dalam konteks kebebasan beragama di bumi pertiwi ini, negara ikut serta mengintervensi wilayah privasi individu maupun kelompok dengan melarang kelompok tersebut untuk tetap eksis. Sebagai negara hukum, tindakan penangkapan dan pelarangan yang kerap kali dilakukan oleh pemerintah, sejatinya merupakan tindakan hukum, bukan politik, sehingga harus ada dasar-dasar yang jelas.

Pemenuhan hak-hak individu maupun komunitas dalam tatanan masyarakat di sebuah negara tersebut tentu sangat erat kaitannya dengan apa yang oleh Hannah Arent dalam *The Human Condition*-nya disebut "ruang publik" dan "ruang privat". Boleh jadi, tulis Arent, kegagalan modernitas yang menjadi "berhala" bagi negara-negara maju dan berkembang (termasuk Indonesia) menganggap tidak relevan lagi memisahkan antara "ruang publik" dan "ruang privat".²⁰

Artinya, wilayah keyakinan perlu dihormati karena bagian penting dari hak asasi seseorang. Penangkapan dan pelarangan oleh aparat pemerintah hendaknya lebih didasarkan atas suatu akibat yang ditimbulkan dan bukan semata-mata mempersoalkan substansi ajarannya.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Lihat Maurizio Passerin d'Entevés, *Filsafat Politik Hannah Arendt*, terj. M. Shafwan, (Yogyakarta: Qalam, 2003), hlm. 230.

C. Kritik atas Doktrin Kekerasan dalam Islam

Semua orang tentu bersepakat bahwa tidak ada agama manapun yang menyuruh pemeluknya untuk melakukan tindak kekerasan. Semua agama di dunia, termasuk Islam, mempunyai konsep dan ajaran ideal untuk perdamaian manusia di bumi. Dengan begitu, mengacu pada kasus penyerangan FPI terhadap AKKBB tersebut, jelas yang patut disalahkan bukan agamanya, apalagi Tuhan. Tetapi para anggotanya-lah yang tidak mampu memahamai ajaran-ajaran agama yang sesungguhnya bersifat manusiawi itu.

Salah satu doktrin terkenal yang lazimnya dijadikan legitimasi dan kata perintah untuk berperilaku anarkis atau kekerasan oleh mereka yang berhaluan "ekstrim", seperti FPI mengacu pada bunyi hadis berikut: "Barangsiapa melihat suatu kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu/kekuasaanmu (*bi yadihi*); Jika tidak bisa, tegurlah dengan ucapan (*bi lisanihi*); Jika (tetap) tidak bisa, cukup dengan mendoakannya (*bi qalbihi*); dan yang demikian itulah lemahnya iman seseorang".

Dalam pandangan penulis, jika tidak ekstra hati-hati memahami makna yang terkandung pada hadis ini justru akan mencitrakan Islam yang oleh sebagian kalangan Barat atau sarjana orientalis dianggap sebagai "agama kekerasan". Lalu bagaimana kita dapat menempatkan makna hadis yang menyerukan *ta'muruna bi al-ma'ruf wa tanha 'an al-mungkar* tersebut di era kontemporer sekarang ini?

Bahwa kalau kita mau kritis dan seksama dalam menelaah hadis itu, dapat disikapi dengan sangat arif, bijak, dan humanis.²¹ Pertama, makna hadis tersebut hemat saya, tidak menunjukkan suatu urutan tindakan seseorang dalam mencegah kemungkaran; tidak berarti mendahulukan tindakan tangan/kekuasaan terlebih dulu, lalu ucapan, dan do'a. Isi maupun makna dari hadis itu sebenarnya mendedahkan pilihan-pilihan alternatif sebagai bentuk tindakan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Kesemuanya memiliki keutamaan tersendiri, yang tidak bisa dibandingkan satu sama lain.

Artinya, tidak ada unsur derajat keimanan yang menyertai dari setiap ketiga tindakan tersebut. Orang yang mencegah kemungkaran dengan fisik/tangan, tidak kemudian bisa dikatakan bahwa derajat

²¹ Lihat Ali Usman, "Mengutamakan Dakwah Kontekstual", dalam *Solopos*, edisi 21 November 2008.

keimannya meninggi. Sementara orang yang hanya bisa mencegah lewat lisan atau bahkan dengan do'a dianggap keimanannya kurang atau dikatakan imannya rendah. Tidak begitu!

Maksud kalimat “dan yang demikian itulah lemahnya iman seseorang” tidak merujuk pada urutan terakhir pada orang yang mencegah kemungkaran hanya lewat do'a. Tetapi menunjuk pada makna lain dari ketiga yang telah disebutkan, yaitu suatu kepasifan seseorang, yang tidak berbuat apa-apa tatkala menyaksikan kemungkaran. Jadi hadis itu dapat diterjemahkan lebih luas kurang lebih begini: “Barangsiapa melihat suatu kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu/kekuasaanmu (*bi yadihi*); Jika tidak bisa, tegurlah dengan ucapan (*bi lisanih*); Jika (tetap) tidak bisa, cukup dengan mendoakannya (*bi qalbih*); dan jika tetap tidak mampu berbuat selain dari ketiga perbuatan tersebut, maka yang demikian itulah lemahnya iman seseorang”.

Kedua, makna *biyadihi* yang berarti mencegah kemungkaran dengan “tangan/kekuasaan” dalam hadis itu perlu diinterpretasi ulang secara lebih humanis. Sebab, hadis yang seringkali dipahami secara tekstual dan “telanjang” apa adanya itulah menjadi biang keladi dan legitimasi seseorang atau kelompok tertentu untuk melakukan tindak anarkis berkedok *amar ma'ruf nahi mungkar*. Pemahaman yang demikian bukan hanya menodai dan mendistorsi visi-misi agama sebagai pembawa pesan perdamaian, tapi dimungkinkan bakal menghancurkan sistem tatanan kehidupan masyarakat yang mengidealkan kerukunan, kedamaian, dan sejenisnya.

Tak terbayangkan, apa jadinya bila setiap orang yang disengaja atau tidak menyaksikan katakanlah sesuatu yang dianggap sebagai “maksiat”, lantas “digebukin” tanpa ampun, dipukul, hingga bahkan tempat yang mereka anggap sarang maksiat juga dihancurkan. Adakah sisi moralitas yang melekat dalam setiap individu maupun kelompok? Lalu di manakah peran negara?

Ironisnya lagi, dalam konteks Indonesia, keberadaan Majelis Ulama Indonesia (MUI)²² “menganut” paradigma atau setidaknya tidaknya sejalan dengan paham yang menganggap *biyadihi* berarti

²² MUI didirikan atas prakarsa mantan presiden Soeharto, yang waktu itu negara membutuhkannya untuk mengabsahkan kebijakan-kebijakan, khususnya yang terkait dengan persoalan sosial-keagamaan.

ber-amar ma'ruf nahi mungkar lewat perbuatan fisik. Terbukti, MUI seringkali mengeluarkan fatwa yang justru menjadi pemicu kelompok-kelompok tertentu untuk berbuat anarkis dengan melakukan aksi penyerangan terhadap orang atau kelompok yang oleh MUI distempel "sesat".

Dalam kasus ini, penyerangan FPI terhadap AKKBB bias diduga lantaran fatwa sesat MUI terhadap eksistensi Ahmadiyah di Indonesia, yang sudah ada sejak sebelum bangsa ini merdeka pada 1920. Menurut Luthfi Assyaukanie, sejak didirikan pada 1975, MUI telah mengeluarkan lebih dari 50 fatwa. Tentang Ahmadiyah, MUI telah mengeluarkan dua fatwa: yang pertama, pada Juni 1980, dan yang kedua pada Juli 2005. Dalam dua fatwa ini, MUI menegaskan bahwa "Aliran Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan." Pada fatwa pertama, MUI tidak secara jelas menyebutkan konsekwensi dari pemberian status sesat itu, tapi dalam fatwa terbarunya, konsekwensi itu jelas disebutkan, yakni mengajak kaum Muslim untuk menyikapi persoalan ini secara tegas.²³

MUI dengan demikian seolah-olah bertindak—meminjam istilah Khaled M. Abou al-Fadl—layaknya Tuhan, sebagai Sang Pemberi Hukum(an), atau bisa juga disebut sebagai "juru bicara Tuhan". Padahal, klaim "sesat dan menyesatkan" itu mestinya hak priogratif Tuhan, bukan manusia.²⁴ Pengambilan hak priogratif "ketuhanan" jauh lebih berbahaya daripada hanya sekadar berbeda keyakinan semata.

Sikap yang "konservatif" seperti itu, oleh banyak kalangan atau pemikir Islam kontemporer disebut sebagai "kaum fundamentalis" yang diidentikkan dengan terorisme. Fundamentalisme semacam ini lebih sering muncul dalam wujud yang negatif. Ia banyak dibungkus dengan nalar perlawanan, logika permusuhan serta—meminjam istilah John L. Esposito—ideologi kebencian.²⁵

Karen Armstrong secara empatik menyebut bahwa tidak bisa disangsikan, benih fundamentalisme ada dalam setiap agama.

²³ Lihat Luthfi Assyaukanie, "Fatwa dan Kekerasan terhadap Ahmadiyah", dalam www.assyaukanie.wordpress.com.

²⁴ Lihat Khaled M. Abou al-Fadl, *Speking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women*, (Oxford: Oneworld Publications, 2003).

²⁵ Ali Usman, "Fundamentalisme Versus Terorisme", dalam *Koran TEMPO*, Minggu, 20 November 2005.

Armstrong menengarai bahwa sikap terlampau fanatik dalam agama (*over fanaticism in religious faith*) sebagai penyebab utama adanya gejala destruktif ini. Paradigma sempit ini yang kemudian berandil menentang setiap upaya sekularisasi dan modernisasi yang terjadi di tubuh agama. Lahirlah absolutisme pemikiran—dengan “perisai” purifikasi ajaran agama—yang memaksakan penafsiran literal terhadap pelbagai problem keumatan. Segala ihwal mesti dirujuk secara skriptual kepada sumber (hukum) tekstual yang serba baku.

Tepat di aras inilah fundamentalisme agama yang pada dasarnya positif (berpegang teguh pada ajaran agama) lalu bergerak liar secara negatif dan destruktif. Roh agama tak lagi dijadikan kekuatan pembebas (*liberating force*) yang menjunjung nilai luhur kemanusiaan (humanisme) dalam porsi yang pantas. Sebaliknya, ia justru dijadikan kekuatan penebas yang memenggal paham dan pemikiran yang berbeda dan tak selaras.

Karena itu, reinterpretasi terhadap doktrin-doktrin keagamaan soal *marma’rufnahimungkar* sangat penting dilakukan untuk melahirkan makna baru yang lebih “segar” dan manusiawi. Pemahaman terhadap doktrin agama harus senantiasa terus ditafsirkan secara kontekstual, sesuai dengan kondisi ruang dan waktu yang mengitarinya. Jika ini gagal dilakukan, maka agama dengan sendirinya akan membeku dan tak mempunyai arti terhadap kehidupan manusia. Sebab, agama pada dasarnya diturunkan ke muka bumi untuk manusia.

Secara internal, semua pihak mestinya sadar bahwa Islam—yang menjadi pemeluk mayoritas di negeri ini—menurut Bruce B. Lawrence tidaklah tunggal.²⁶ Islam adalah banyak hal. Tidak ada satu penjelasan pas yang melukiskan berbagai kelompok muslim dengan nilai dan arti yang sama. Juga, tidak ada lokasi tunggal ataupun budaya seragam yang identik dengan Islam.

D. Adakah ruang kedamaian?

Sampai di sini, barangkali kita masih bertanya-tanya, mengapa tindakan-tindakan kekerasan atas nama agama terus terjadi? Lalu, masihkah ada ruang kedamaian di dalam masyarakat multikultur tersebut? Menurut Azumardi Azra, jawabannya amat rumit. Namun,

²⁶ Lihat Bruce B. Lawrence, *Islam Tidak Tunggal: Melepaskan Islam dari Kekerasan*, terj. Harimukti Bagoes Oka, (Jakarta: Serambi, 2004), hlm. 38.

jika bisa disederhanakan dalam perspektif hubungan antaragama adalah, pertama, masih kuatnya rasa saling curiga di antara umat agama berbeda. Masih kuat, misalnya, kecurigaan di kalangan umat Islam, bahwa lembaga, keyakinan tertentu, kepemimpinan, dan perbedaan agama.

Kedua, belum terejawantahnya dialog-dialog yang *workable* antara kepemimpinan agama level tengah dan bawah. Memang dialog-dialog intra dan antaragama kelihatan terus berlangsung, tetapi—harus diakui—umumnya baru sampai pada level kepemimpinan puncak, di tingkat nasional maupun daerah. Jarang sekali terjadi dialog-dialog intra dan antaragama pada level tengah dan bawah kepemimpinan agama, yang justru bergerak dan amat berpengaruh terhadap masyarakat tingkat akar rumput. Padahal kepemimpinan agama pada level inilah yang bisa menghitamputihkan massa, yang bisa membuat massa murka, atau, sebaliknya, menjadikan mereka lebih tenang dan beradab.²⁷

Dalam konteks ini, perlu pengembangan dialog-dialog intra dan antar agama, tidak hanya pada level puncak, tetapi juga pada level tengah dan bawah kepemimpinan agama. Memang beberapa daerah provinsi dan kabupaten/kota telah membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tetapi dialog-dialog yang diselenggarakan FKUB belum tersosialisasikan ke tingkat bawah untuk kemudian bisa menciptakan hubungan intra dan antarumat beragama yang lebih sehat, harmonis, dan dinamis.

Kekerasan dan pertikaian yang kerap terjadi sesungguhnya menyadarkan kita akan pentingnya dialog—di samping kesadaran toleransi antara-sesama—untuk lebih dikedepankan daripada hanya mengandalkan “otot”. Dialog dan kesadaran bertoleransi sampai saat ini masih dianggap sebagai senjata ampuh untuk menetralsir perbedaan yang menganga di masyarakat. Walaupun kekerasan selalau datang bertubi-tubi, ternyata kedamaian dengan demikian masih ada dan terbuka untuk dikecap oleh setiap insan.

Paul F. Knitter menyatakan bahwa setiap orang memiliki teleskopnya masing-masing yang merepresentasikan budaya atau agamanya, untuk melihat dan mengamati yang lain. Namun, perspektif kita tentang kebajikan hanya sejauh area yang dicapai

²⁷ Azumardi Azra, “Kekerasan atas Nama Agama”...

teleskop ini. Karena itulah kita butuh teleskop-teleskop lain untuk memperluas sudut pandang kita yang terbatas. Jika kita menganggap bahwa kebenaran adalah sebagaimana yang kita lihat melalui teleskop budaya dan agama kita sendiri, itu berbahaya.²⁸

Karenanya, jika dialog dan kesadaran teologi telah terbangun, dengan sendirinya, hambatan-hambatan seperti yang disebutkan Mega Hidayati, yaitu prasangka, kesalahpahaman dan konflik,²⁹ kemungkinan besar akan teratasi. Keragaman budaya yang hidup-berkembang dalam masyarakat akan terjaga, dan terpelihara dengan baik. Seseorang atau sekelompok orang hanya akan tampak penting jika bisa dibedakan dari orang dan kelompok lain.

Sebagai kata pamungkas, saya ingin berbagi pengalaman soal toleransi dan kedamaian yang tersemayam di salah satu sudut kota Jogjakarta. Sudah sejak lama, Jogja dikenal sebagai *city of tolerance*. Predikat ini tentu saja bukan buaian alias omong kosong belaka. Di samping terkenal karena kota pendidikan, Jogja juga dikenal sebagai tempat pariwisata yang sampai saat ini masih menyemai pelbagai warisan budaya nusantara. Toleransi masyarakatnya sangat kuat, sehingga memungkinkan untuk bersikap terbuka terhadap segala produk budaya lain, walau itu datangnya dari luar daerah sekalipun.

Bahkan dalam batas-batas tertentu, silang budaya dan agama, yang mencerminkan masyarakat plural benar-benar berwujud nyata di kota gudeg ini. Saya ingin mencontohkan satu hal yang boleh jadi, mungkin oleh sebagian orang dianggap remeh temeh. Tetapi bagi saya, sangat luar biasa sebagai bentuk kesadaran diri setiap individu maupun kelompok untuk saling menghormati satu lain demi terciptanya kerukunan dan perdamaian antar sesama.

Saya merasa lumayan tahu dan paham betul seluk-beluk, lika-liku kota Jogja, meski saya baru enam tahun berjalan menggecap indahannya panorama kota ini. Di tempat saya tinggal sekarang, saya sudah terbiasa menyaksikan, dan bahkan mengikuti acara-acara yang sebenarnya di luar adat kebiasaan saya dan orang Jogja pada umumnya dengan sangat antusias menghargai budaya warga pendatang.

²⁸ Lihat F. Paul Knitter, *Introducing: Theologies of Religions*, (New York: Orbis Book, 2002). Lihat juga Mega Hidayati, *Jurang di Antara Kita: Tentang Keterbatasan Manusia dan Problema Dialog dalam Masyarakat Multikultur*, (Yogyakarta: Kanisius, 2008).

²⁹ Mega Hidayati, *Jurang di Antara Kita...* hlm. 24-26.

Di momen Imlek misalnya, wujud penghargaan masyarakat Jogja diwujudkan dalam bentuk yang amat unik. Mereka para warga (maaf) non-Tionghoa dengan senang hati memakai pakaian khas China atau Tionghoa sembari menonton tarian Barongsai. Dan yang lebih mengharukan lagi, saya sangat kagum, lagi-lagi di lokasi yang saya tempati saat ini, setiap kali warga ditimpa musibah (kematian) yang kebetulan beragama muslim, para tetangga yang beragama Kristen juga ikut melayat sekaligus ikut "mentahlili" (do'a bersama untuk almarhum; biasanya sampai 7 hari) di rumah duka pada malam harinya. Begitu pula ketika Natal tiba, warga sekitar yang beragama muslim juga berduyun-duyun menghadiri undangan dan mendengar pesan-pesan Natal dari seorang Romo.

Fakta sosial seperti yang tergambar di atas saya menyebutnya dengan istilah "*living pluralism*". Pemahaman tentang pluralisme telah hidup dan dipraktikkan dalam denyut nadi keseharian masyarakat Jogja. Seorang kawan pernah bergumam lirih di samping saya: "Jogja memang surganya dunia". Dalam masyarakat yang demikian, tidak ada lagi kata "aku-dia", "mereka-kita", tapi telah melebur jadi satu kesatuan dalam kata "kami".

Secara filosofis, toleransi dan saling tolong menolong tanpa mengenal sekat-sekat tertentu itu—sebagaimana ditunjukkan oleh masyarakat Jogja—merupakan kesadaran diri setiap individu akan keterbatasannya sebagai manusia. Sikap dasar dari jalan ini adalah adanya keterbukaan satu sama lain, yang oleh Hans-Georg Gadamer memiliki dua arti: keterbukaan untuk belajar dan keterbukaan untuk merespons. Yang pertama menekankan bahwa seseorang ingin mempelajari cakrawala orang lain. Ini hanya terjadi jika seseorang memandang cakrawala orang lain bernilai. Yang kedua berarti seseorang ingin merespons dengan bijaksana. Dengan mempelajari cakrawala orang lain, seseorang berkeinginan meresponsnya, dan orang akan kembali mempertimbangkan pemikirannya, sehingga perbaikan dalam pemahaman terjadi.³⁰

Pertanyaanya, apakah kesadaran masyarakat Jogja terhadap pemahaman pluralisme yang seperti itu merupakan hasil dari "kampanye" kaum agamawan dan akademis? Saya tidak sepenuhnya mengiyakan. Sebab, perilaku "*living pluralism*" khusus di Jogja menurut

³⁰ Mega Hidayati, *Jurang di Antara Kita...* hlm. 62-63.

sumber sejarah, telah melestarikan bersamaan dengan kultur keratonnya, jauh sebelum kaum agamawan dan akademis kita berkoar-koar mendakwahkan kalau menghormati perbedaan itu baik. Perilaku masyarakat Jogja hemat saya, jauh melampaui pemahaman tentang pluralisme itu sendiri.

Jadi, toleransi dan saling menghormati antar-sesama merupakan bagian integral dari *living pluralism* masyarakat Jawa. Negaralah, terutama rezim Orde baru yang memporak-poranda ketentaraman masyarakat demi kepentingan *status quo* politik dan kekuasaan. Dari kota para Sultan ini, saya terus berharap, semoga *living pluralism* itu tetap dipupuk hingga waktu tak terbatas nanti. Bagaimana dengan daerah lain?***

Daftar Pustaka

- Al-Fadl, Khaled M. Abou. *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women*. Oxford: Oneworld Publications, 2003
- Assegaf, Arifin. "Memahami Sumber Konflik Antariman", dalam Th. Sumartana, dkk, *Pluralisme, Konflik dan Pendidikan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Institut Dian/Interfidei, 2001
- Azra, Azumardi. "Kekerasan atas Nama Agama", dalam *Kompas*, edisi 27 Juli 2007
- Assyaukanie, Luthfi. "Fatwa dan Kekerasan terhadap Ahmadiyah", dalam www.assyaukanie.wordpress.com
- Douglas, Jack D. dan Frances Chaput Waksler, "Kekerasan", dalam Thomas Santoso (ed.), *Teori-teori Kekerasan*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2002
- d'Entevés, Maurizio Passerin. *Filsafat Politik Hannah Arendt*, terj. M. Shafwan. Yogyakarta: Qalam, 2003
- Hidayati, Mega. *Jurang di Antara Kita: Tentang Keterbatasan Manusia dan Problema Dialog dalam Masyarakat Multikultur*. Yogyakarta: Kanisius, 2008
- Houtart, Francis. "The Cult of Violence in the Name of Religion: A Panorama", dalam Wim Beuken dan Karl Josef Kuschel (ed.), *Religion as a Source of Violence*. London: SCM Press, 1997

- Knitter, F. Paul. *Introducing: Theologies of Religious*. New York: Orbis Book, 2002
- Lawrence, Bruce B. *Islam Tidak Tunggal: Melepaskan Islam dari Kekerasan*, terj. Harimukti Bagoes Oka. Jakarta: Serambi, 2004
- Nasir, Haedar. *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Osman, Mohammed Fathi. *Islam, Pluralisme dan Toleransi Keagamaan*, terj. Irfan Abubakar. Jakarta: Yayasan Paramadina, 2006
- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1982
- Shaleh, Abdul Qadir. *"Agama" Kekerasan*. Yogyakarta: Prismsophi, 2003
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia, 1987
- Shihab, Alwi. *Islam Inklusif, Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Bandung: Mizan, 1999
- Sindhunata. *Kambing Hitam: Teori René Girard*. Jakarta: Gramedia, 2006
- Windhu, I. Marshana. *Kekuasaan dan Kekerasan menurut Johan Galtung*. Yogyakarta: Kanisius, 2002
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Depdikbut dan Balai Pustaka, 1988
- Usman, Ali. "Mengutamakan Dakwah Kontekstual", dalam *Solopos*, edisi 21 November 2008
- . "Fundamentalisme Versus Terorisme", dalam *Koran TEMPO*, Minggu, 20 November 2005